

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara.² Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab kesenjangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata masih menjadi tantangan besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan untuk berbagai bidang di Indonesia sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan seperti masalah ekonomi. Ekonomi adalah bidang yang paling utama dalam melakukan pembangunan. Walaupun terjadi pembangunan lainnya seperti halnya dalam bidang pendidikan, sumber daya manusia, ataupun pada bidang infrastruktur.³

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan ketimpangan antara capaian tingkat makro dan kondisi riil tingkat at. Peningkatan ekonomi belum diiringi pemerataan kesejahteraan, terlihat dari

² Shalomita Agustina et al., “Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2022): 113–26, <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i1.31>.

³ dkk. Irwan Harsono, *Pembangunan Ekonomi Kewilayahan*, ed. Efitra, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

masih tingginya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja layak, sehingga kebijakan ekonomi perlu difokuskan pada kualitas pertumbuhan, penciptaan kerja, dan pengurangan kesenjangan agar manfaatnya lebih merata. Berdasarkan pandangan Sukirno dalam jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Jeni dan Abu Bakar, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan cepat menjadikan pengangguran di suatu wilayah berkurang, yang memiliki arti bahwasanya pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan tingkat dari pengangguran. Hal ini dapat terjadi jika di suatu wilayah mengalami peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proses produksi juga akan meningkat.⁴

Salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Negara dengan kondisi perekonomian yang stabil dapat digolongkan sebagai negara maju, sedangkan negara yang masih menghadapi keterpurukan ekonomi belum dapat disebut sebagai negara maju. Menurut Lincoln Arsyad dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat”, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB), tanpa memperhatikan apakah laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk, serta tanpa mempertimbangkan adanya perubahan struktur perekonomian.⁵

⁴ Jeni Palindangan and Abu Bakar, “Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika,” *Jurnal Kritis* 5, no. 1 (2021): 65–80.

⁵ Arsyad Lincoln, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999).

Pertumbuhan ekonomi regional dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat secara menyeluruh yang tercermin dari bertambahnya nilai tambah (*value added*) dalam suatu wilayah tertentu. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi regional adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.⁶

Semakin tinggi nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, maka semakin baik pula kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang dapat diukur melalui tingkat kemiskinan. Perhitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, di mana perhitungan harga berlaku menggunakan nilai tambah barang dan jasa sesuai dengan harga pada tahun berjalan. Namun demikian, perbedaan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) antar wilayah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti halnya, dari variabel makro.⁷

Perbedaan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) antar wilayah tersebut tidak hanya mencerminkan variasi tingkat aktivitas ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya konsentrasi pertumbuhan pada

⁶ Qomarul Huda Dan Timbul, *Analisis Ekonomi Regional Kediri Raya*, ed. Agus Eko Sujianto (Tulungagung: Cahaya Abadi, 2018). Hlm. 11-13.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 10.

daerah-daerah tertentu yang memiliki karakteristik ekonomi dan demografi yang lebih dominan. Kondisi ini umumnya terlihat pada provinsi dengan jumlah penduduk besar yang cenderung memiliki kontribusi ekonomi lebih tinggi karena didukung oleh ketersediaan tenaga kerja, luasnya pasar, serta tingginya aktivitas produksi. Dalam konteks tersebut, dinamika pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional dapat diamati secara lebih representatif melalui enam provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten, yang mencerminkan keterkaitan antara faktor demografi, distribusi pendapatan ataupun redistribusi pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.

Tabel 1. 1
Nilai Produk Domestik Regional Regional Bruto (PDRB) Indonesia
Tahun 2019–2024 (dalam Miliar)

Tahun	Provinsi					
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DKI Jakarta	Sumatera Utara	Banten
2019	2,123,153.71	1,360,960.13	2,345,548.55	2,815,636.16	799,608.95	661,321.34
2020	2,082,107.26	1,347,222.49	2,299,807.64	2,767,273.49	811,188.31	625,895.38
2021	2,204,660.23	1,419,735.15	2,454,792.00	2,912,885.34	859,934.26	665,870.30
2022	2,422,782.32	1,559,140.36	2,731,423.63	3,188,541.22	955,193.09	747,220.84
2023	2,625,225.72	1,695,621.57	2,953,546.98	3,443,026.23	1,050,995.41	814,122.03
2024	2,823,338.73	1,817,776.96	3,168,295.58	3,679,358.60	1,146,919.76	873,626.25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024⁸

⁸ Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi,” 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics->

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa enam provinsi berdasarkan jumlah penduduk terbesar di Indonesia mengalami peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara relatif konsisten selama periode 2019 hingga 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten pada periode 2019–2024, memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan yang cukup serius. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, konsentrasi investasi di daerah tertentu, serta pembangunan infrastruktur yang belum seimbang sehingga berpotensi pada pertumbuhan ekonomi.

Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini mencerminkan peran DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan keuangan nasional. Struktur ekonominya yang didominasi sektor tersier (perdagangan, keuangan, transportasi, dan jasa ingkat at) menjadikan provinsi ini motor utama perekonomian Indonesia.

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga sangat besar. Jawa Timur dikenal dengan kekuatan sektor industrinya, terutama ingkat pengolahan, ekspor, dan perdagangan antarwilayah.

Jawa Barat menonjol karena peran sektor manufaktur, tingkat teknologi, serta investasi besar dari tingkat tingkat Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kedua provinsi ini memiliki basis ekonomi yang kuat.

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi menengah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang stabil, namun pertumbuhannya tingkat lebih moderat dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Struktur ekonomi Jawa Tengah lebih banyak ditopang oleh sektor pertanian, tingkat kecil-menengah, dan perdagangan tradisional. Walaupun laju pertumbuhannya tidak secepat dua provinsi tetangganya, Jawa Tengah menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup resilient terutama dalam sektor tingkat padat karya dan manufaktur ringan. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi Jawa Tengah tetap tumbuh positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal produktivitas dan investasi besar.

Provinsi Sumatera Utara mencerminkan kondisi ekonomi wilayah barat Indonesia di luar Pulau Jawa. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa, namun pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Sumatera Utara memiliki basis ekonomi di sektor tingkat at, tingkat pengolahan hasil bumi, serta perdagangan tingkat . Meski kontribusinya terhadap total nasional belum sebesar provinsi di Jawa, peningkatan nilai PDRB-nya menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi regional.

Provinsi Banten, sebagai wilayah penyangga utama DKI Jakarta,

mengalami pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang stabil. Wilayah ini banyak diuntungkan oleh kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional, serta keberadaan tingkat tingkat dan tingkat a strategis seperti Cilegon dan Merak. Pertumbuhan Banten cenderung mengikuti pola Jakarta, di mana peningkatan investasi dan kegiatan tingkat menjadi pendorong utama.

Dari sisi waktu, tahun 2020 menjadi periode terendah bagi semua provinsi karena dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi nasional. Namun, sejak 2021 hingga 2024, seluruh provinsi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Peningkatan paling signifikan terjadi di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yang didorong oleh kembalinya aktivitas tingkat manufaktur dan ekspor. Sementara Jawa Tengah dan Sumatera Utara menunjukkan pemulihan yang lebih bertahap, terutama di sektor tingkat dan perdagangan lokal.

Indonesia terus melakukan pergerakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui pembangunan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah melakukan pengesahan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan maksud memperbarui suatu perubahan bentuk pembangunan daerah dari sentralistik menjadi tersentralisasi.⁹ Perubahan desentralisasi dapat memberikan wujud pemerintah untuk melakukan suatu perubahan yang dimana dengan

⁹ Sekretariat JDIH BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 2014.

tercapainya desentralisasi akan meningkatkan efektivitas dalam pembiayaan belanja daerah, meningkatkan investasi swasta, serta meningkatkan kesejahteraan dari suatu daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian ruang bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam suatu pembangunan ekonomi. Indikator dari kinerja pemerintah daerah sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan dari dalam, seperti jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan distribusi pendapatan yang merata.¹⁰ Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi motor penggerak pembangunan apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Selanjutnya, penyaluran zakat, Infaq, dan shodaqoh berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang mampu menekan kesenjangan sosial sekaligus mendorong peningkatan daya beli. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli turut memberikan kontribusi penting terhadap produktivitas ekonomi nasional. Pada akhirnya, ketiga faktor tersebut berperan dalam

¹⁰ Intan Frita Debora Datu, Daisy S.M Engka, and Ita Pingkan F. Rorong, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021): 1447–54.

memperkuat tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, yang sekaligus menjadi landasan utama bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2019–2024, Indonesia menghadapi dinamika pertumbuhan ekonomi sebelum, disaat COVID-19 hingga pasca COVID-19 yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk, penyaluran dana ZIS, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹¹ Jumlah penduduk mengalami peningkatan dapat menjadi potensi sekaligus tantangan. Dalam konteks filantropi Islam, dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan kaum dhuafa dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inilah telah dijadikan salah satu parameter yang berguna dalam mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, produktivitas ekonomi cenderung mengalami pertumbuhan positif.

Dalam konteks ini, jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperbesar ketersediaan tenaga kerja dan pasar potensial bagi produk domestik, tetapi juga berisiko menimbulkan tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja,

¹¹ Dheasey Amboningtyas, Edward Gagah P Taunay, and Yunni Rusmawati, “Kondisi UMKM Di Kota Semarang Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 2021, 526–37, <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/185>.

layanan pendidikan, dan kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika jumlah penduduk menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan demografi dapat memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi nasional. Data jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun memberikan gambaran yang jelas mengenai tren pertumbuhan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2019–2024 (dalam Ribu)

Tahun	Provinsi					
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DKI Jakarta	Sumatera Utara	Banten
2019	49,316.7	34,718.2	39,698.6	10,557.8	14,562.5	12,927.3
2020	48,274.2	36,516.0	40,665.7	10,562.1	14,799.4	11,904.6
2021	48,782.4	36,742.5	40,878.8	10,609.7	14,936.2	12,061.5
2022	49,405.8	37,032.4	41,150.0	10,680.0	15,115.2	12,252.0
2023	49,860.3	37,541.0	41,527.9	10,672.1	15,386.6	12,307.7
2024	50,345.2	37,892.3	41,814.5	10,684.9	15,588.5	12,431.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024¹²

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 jumlah penduduk di enam provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang ingkat stabil sepanjang tahun 2019 hingga 2024. Kenaikan jumlah penduduk ini memperlihatkan adanya pertumbuhan demografis yang berkelanjutan, dengan menjadi potensi bagi ingkat at ekonomi, namun di sisi lain juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi oleh

¹² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Di Indonesia (Ribu Jiwa), 2024,” 2024, <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-diindonesia.html>.

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lapangan kerja yang memadai.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masing-masing mencapai sekitar 50.345 ribu jiwa, 37.893 ribu jiwa, dan 41.815 ribu jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk yang tinggi di ketiga provinsi ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekonomi. Jawa Barat memiliki kepadatan tertinggi karena letaknya yang strategis sebagai penyangga ibu kota dan pusat tingkat manufaktur. Jawa Timur menempati posisi kedua dengan pertumbuhan yang konsisten, didorong oleh aktivitas tingkat pengolahan di tingkat metropolitan Surabaya. Sementara itu, Jawa Tengah mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih stabil akibat tingkat urbanisasi yang lebih rendah serta adanya migrasi keluar ke daerah tingkat seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan penduduk yang tingkat stagnan dengan jumlah sekitar 10.684 ribu jiwa pada tahun 2024. Kepadatan tinggi dan keterbatasan lahan membuat pertambahan penduduk di ibu kota menjadi lambat, bahkan tingkat berpindah ke wilayah sekitarnya. Hal ini memperlihatkan hubungan antara daya tingkat wilayah dan tekanan demografis: semakin terbatas ruang dan sumber daya, semakin kecil kemampuan daerah untuk menampung penduduk baru. Walaupun demikian, produktivitas ekonomi Jakarta tetap tinggi karena menjadi pusat kegiatan jasa, pemerintahan, dan keuangan nasional.

Provinsi Sumatera Utara dan Banten memperlihatkan pertumbuhan yang stabil namun dengan pola yang berbeda. Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk sekitar 15.588 ribu jiwa, memiliki pertumbuhan alami melalui kelahiran dan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan tingkat. Namun luas wilayah yang besar dan penyebaran penduduk yang tidak merata membuat efisiensi tingkat masih terbatas. Di sisi lain, Banten dengan 12.431 ribu jiwa mengalami peningkatan akibat migrasi dari DKI Jakarta serta perkembangan tingkat tingkat dan jasa. Posisi geografisnya yang strategis di ujung barat Pulau Jawa menjadikan Banten sebagai magnet pertumbuhan penduduk baru, sekaligus memunculkan tantangan dalam pengelolaan urbanisasi dan infrastruktur tingkat.

Pola ini relatif stabil setiap tahunnya, yang berarti daerah dengan jumlah penduduk besar tetap mendominasi, sementara daerah dengan jumlah penduduk kecil tetap berada di urutan terbawah. Meski terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar daerah, tren keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah penduduk di seluruh provinsi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut mencerminkan ketimpangan dalam persebaran penduduk yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, peluang kerja, dan kualitas infrastruktur antarwilayah. Daerah dengan tingkat industrialisasi tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten cenderung menarik arus migrasi karena menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Sebaliknya, wilayah seperti Sumatera Utara memiliki potensi penduduk besar, namun pertumbuhannya lebih lambat akibat

distribusi ekonomi dan pembangunan yang belum merata di seluruh kabupaten dan kota.

Pertumbuhan ekonomi di negara yang berkembang yaitu Indonesia juga dapat direalisasikan melalui redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui proses pemerataan distribusi pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan agar tercipta keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, redistribusi pendapatan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, baik kebijakan pemerintah seperti pajak dan bantuan sosial, maupun mekanisme sosial berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu bentuk redistribusi pendapatan yang penting adalah melalui penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS).¹³

Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) berperan penting dalam menyongsong pertumbuhan ekonominya. Sebagai instrumen keuangan sosial, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) membantu mengurangi kemiskinan dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Dana yang disalurkan kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak yatim, dan pelaku usaha kecil yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Selain itu, penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) juga mendorong

¹³ Ainul Iksan, dkk., *The Great Redistribution Zakat Sebagai Solusi Ketimpangan Ekonomi Dunia*, ed. Khusnul Khatima, Pertama (Jawa Barat: Goresan Pena, 2026).

perputaran ekonomi melalui peningkatan daya beli tingkat at penerima manfaat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di tingkat mikro, pertumbuhan ekonomi nasional pun dapat terdorong secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 1. 3
Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Indonesia
Tahun 2019–2024 (dalam Triliun)

Tahun	Provinsi					
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DKI Jakarta	Sumatera Utara	Banten
2019	1,448,157,699,885	216,095,880,307	488,591,369,135	1,958,261,214,478	28,214,051,760	180,040,053,450
2020	1,461,786,785,707	265,972,928,955	645,022,215,398	2,406,706,592,131	49,849,716,570	218,480,139,853
2021	1,454,822,784,551	325,669,886,240	579,368,652,339	2,971,244,351,062	68,333,605,039	264,264,625,161
2022	1,063,363,398,749	249,376,376,585	69,395,816,325	1,704,250,894,017	10,684,200	59,610,546,413
2023	505,399,360,206	401,241,609,092	376,012,418,317	282,865,282,826	69,354,175,976	138,053,705,478
2024	574,823,616,718	446,633,501,219	410,667,736,418	337,306,157,043	73,966,589,677	154,876,219,128

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2019–2024¹⁴

Pada tabel 1.3 menunjukkan perkembangan penyaluran dana Zakat,

¹⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, “Outlook Zakat Indonesia 2024,” 2024, <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>.

Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di beberapa provinsi besar di Indonesia, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten selama periode 2019–2024. Provinsi dengan jumlah penduduk tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta cenderung memiliki penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh besarnya potensi muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) di daerah tersebut, yang mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin besar pula potensi penghimpunan serta penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS).

Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) ini disalurkan dalam beberapa bentuk program, seperti yang dijelaskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu bidang kemanusiaan berupa bantuan untuk korban bencana alam, bantuan darurat, santunan yatim/piatu, dan bantuan sosial kemanusiaan lainnya, program kesehatan berupa penyaluran zakat untuk layanan kesehatan gratis, program pendidikan beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, dan dukungan pendidikan bagi anak mustahik, program ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi umat, seperti modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan bantuan alat produksi, serta program dakwah dan advokasi berupa bantuan untuk kegiatan dakwah, keagamaan, dan advokasi sosial masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga diarahkan

untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tercipta kemandirian.

Peningkatan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dapat berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor mikro. Walaupun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tidak seluruh masyarakatnya beragama Islam. Keberadaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) tetap memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang diterima oleh mustahik (penerima zakat) dapat meningkatkan daya beli, mendorong kegiatan usaha kecil, dan memperkuat perputaran ekonomi lokal. Dengan demikian, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) tidak hanya berperan sebagai instrumen sosial keagamaan, tetapi juga sebagai salah satu sarana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi juga didasarkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia merupakan tujuan utama dari suatu pembangunan itu sendiri. Pembangunan inilah memiliki suatu hal positif untuk mewujudkan kemampuan dari negara kategori berkembang dalam menekankan teknologi canggih untuk meningkatkan kapasitas pada bidang menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran sebagai wujud pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Tabel 1. 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia
Tahun 2019–2024 (dalam Persen)

Tahun	Provinsi					
	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DKI Jakarta	Sumatera Utara	Banten
2019	72.03	71.73	71.5	80.76	71.74	72.44
2020	72.61	71.88	73.04	81.92	73.62	74.41
2021	72.96	72.17	73.48	82.25	73.84	74.68
2022	73.63	72.8	74.05	82.77	74.51	75.25
2023	74.24	73.39	74.65	83.55	75.13	75.77
2024	74.43	73.88	74.09	83.08	74.02	74.48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024¹⁵

Pada tabel 1.4 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di enam provinsi besar Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten selama periode 2019 hingga 2024. Secara umum, seluruh provinsi mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun, yang berarti adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator terkait kualitas hidup dengan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera, yang

¹⁵ Badan Pusat Statistik, “[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2024,” 2024, n.d., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI=-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>.

berdampak positif pada produktivitas dan inovasi. Negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi umumnya memiliki kebijakan publik yang mendukung pembangunan manusia, seperti alokasi sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menciptakan sinergi antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini memperbarui temuan Ririn Rusmawati tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk memiliki peran penting dalam meningkatkan penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) meskipun penelitian tersebut masih berfokus pada proses penghimpunan dan belum mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada studi Vika Fatimatuz Zahro tahun 2017 yang meneliti pengaruh Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat periode 2013–2016.¹⁷ Kedua penelitian tersebut menjadi dasar penting karena mengangkat variabel yang relevan, namun penelitian ini memberikan pembaruan dengan memperluas cakupan pada enam provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, memasukkan jumlah penduduk sebagai

¹⁶ Ririn Rusmawati, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penghimpunan Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Di Indonesia Tahun 2012-2016,” 2019, 1–11.

¹⁷ Vika F Zahro, “Pengaruh Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016,” *Skripsi*, 2017, 1–108.

variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta menggunakan data panel tahun 2019–2024 sehingga menghasilkan kajian empiris yang lebih luas dan mutakhir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian inilah memiliki maksud guna mengukur dan menjelaskan terkait **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia”** dengan periode 2019–2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh signifikan jumlah penduduk, penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) serta indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh signifikan jumlah penduduk secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh signifikan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh simultan jumlah penduduk, penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) serta indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan terhadap suatu bentuk pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh signifikan jumlah penduduk secara parsial terhadap suatu bentuk pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh signifikan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) secara parsial terhadap suatu bentuk pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) secara parsial terhadap suatu bentuk pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, terdapat harapan besar terkait penelitian ini untuk memberikan manfaat.

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan sebagai pengetahuan terkait pengaruh jumlah penduduk, pengaruh adanya penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) serta pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM)

terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia pada tahun 2019–2024.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna sebagai acuan ataupun masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan strategi terkait pertumbuhan ekonomi sehingga dapat ditemukan sebuah solusi yang efektif dan berguna di masa yang akan datang.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung untuk dijadikan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari adanya penelitian ini dapat berguna untuk dukungan pedoman tambahan bagi penelitian berikutnya dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan yang lebih unggul.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya rumusan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa terkait

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel X sebagai variabel bebas (*independent*) terdiri dari X1 (Jumlah Penduduk), X2 (Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)), X3 (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)), dan variabel Y sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel Jumlah Penduduk, Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penelitian ini juga melakukan pembatasan periode waktu yang ditetapkan yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

F. Penegasan Variabel

Secara istilah yang dimaksud dengan "Pengaruh Jumlah Penduduk, Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia" adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan orang, baik secara individu maupun dalam bentuk beregu, yang telah menduduki suatu wilayah atau negara tertentu dengan waktu paling sedikit selama satu tahun pada saat dilakukan pendataan penduduk atau sensus. Penduduk memiliki

beberapa komponen yang harus dipenuhi. Jumlah penduduk adalah keseluruhan individu yang tinggal di suatu wilayah dalam periode tertentu.¹⁸ Jumlah penduduk diperoleh melalui sensus penduduk, registrasi administrasi kependudukan, atau survei sosial ekonomi. Jumlah penduduk penting karena menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, termasuk alokasi anggaran dan penyusunan kebijakan publik. Dalam penelitian, jumlah penduduk biasanya dinyatakan dalam satuan jiwa atau orang.

2. Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Secara etimologi, zakat memiliki arti suci, bertambah keberkahan, baik, dan bertambah. Selain itu, secara bahasa, zakat dapat diambil arti sebagai bagian dari sebagian harta tertentu yang telah *difardhukan* oleh Allah SWT dan telah didistribusikan untuk seseorang yang berhak untuk menerimanya. Dalam Al-Qur'an telah dikatakan yaitu fakir miskin, dan segolongannya sebagai bentuk dari wujud rasa syukur atas berkah dari Allah SWT. Infaq ini asalnya dari kata *anfaqa* yang mempunyai arti memberikan hartanya sebagai wujud suatu keberkahan dan juga kepentingan. Menurut terminologi Islam, Infaq berarti mengeluarkan suatu harta ataupun penghasilan dari seseorang guna kepentingan tertentu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Islam. Sedangkan pengertian secara terminologi syariat Islam,

¹⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Data Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun 2023," SATU DATA, 2024, <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/3f42d18b-3c5f-4e64-9e32-e3d82b34f62a>.

Shodaqoh sama dengan pengertian Infaq. Namun perbedaannya hanya disisi objeknya, Infaq bersifat materi sedangkan Shodaqoh bersifat materi juga non materi.

Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) adalah proses pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh kepada pihak yang berhak menerima (mustahik). Dana tersebut berasal dari penghimpunan masyarakat melalui lembaga amil zakat resmi maupun unit pengelola zakat. Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) juga berperan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program produktif. Dalam penelitian, penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) diukur dengan skala ratio berdasarkan total dana yang disalurkan dalam satuan rupiah per periode tertentu.¹⁹

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang menunjukkan pencapaian pembangunan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia (IPM), maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Dalam penelitian, indeks pembangunan manusia (IPM) diukur

¹⁹ Nur Alam dan Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*, ed. Rezalikh (DKI JAKARTA: BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA, 2021). Hlm. 39-48.

dengan skala 0 sampai 100 berdasarkan standar BPS.²⁰

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk untuk mewujudkan bertambahnya pendapatan seluruh masyarakat suatu negara dari segi jangka kedepan atau panjang ataupun yang berkelanjutan serta juga melibatkan perbaikan dari suatu sistem kelembagaan, yang mana pada saat itu pula kemampuan dari perekonomian untuk menciptakan barang maupun jasa akan mengalami peningkatan. Indikator yang umum digunakan adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²¹

G. Definisi Operasional

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia dalam suatu wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:²² Dalam Penelitian ini, diukur

²⁰ Bakhtiar Efendi, et al., *Teori Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*, ed. Miftahul Jannah (Tahta Media Group, 2024).

²¹ “Pertumbuhan Ekonomi,” Pemerintah Kabupaten Dogiyai, 2023, <https://www.dogiyaikab.go.id/index.php?route=page&tk=kpw=>.

²² BPS Indonesia, *Indonesia Population Projection Based on Census 2020*, Badan Pusat Statistik, 2023, <https://webapi.bps.go.id/download.php?f=D/qQDyqOikWjGBHgQ+e2asZYx83/z3N4GXHPtfhAc7AMoBc/bw/UHfQDg3gSYVfYmQ9gQ5ID5cAwe0D84TkG+/O7tRJbsZDV/DDfqpqDKRh7zrtLis0RCa/wymwvxDdTVWY4HhzwYyuXiTLR0mMt7VUX9HTEZ0IjXtCP49BxBxpIs7SNBYbPqSi2Ns66mXJMLLVk9qHJErBnzwEejZA0EX>.

menggunakan skala ratio dan jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan ribu jiwa.

$$JP_t = JP_{t-1} + (L_t - M_t) + (K_t - K_m)$$

Keterangan:

JP_t = jumlah penduduk pada tahun ke-t

JP_{t-1} = jumlah penduduk tahun sebelumnya

L_t = jumlah kelahiran pada tahun ke-t

M_t = jumlah kematian pada tahun ke-t

K_t = jumlah imigrasi (pendatang) pada tahun ke-t

K_m = jumlah emigrasi (keluar daerah) pada tahun ke-t

2. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Indonesia dalam suatu wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:²³ Dalam penelitian ini, penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) diukur menggunakan skala ratio dan dinyatakan berdasarkan total dana yang disalurkan dalam satuan triliun rupiah.

$$ZIS = Z + I + S$$

Keterangan:

Z = total zakat yang disalurkan

I = total infaq yang disalurkan

S = total shodaqoh yang disalurkan

²³ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori Dan Konsep* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2019).

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dalam suatu wilayah dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁴ Dalam penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan skala ratio dan dinyatakan dalam persen setiap periode tahunan.

$$IPM = \sqrt[3]{Indeks_{Kesehatan} + Indeks_{Pendidikan} + Indeks_{Pendapatan}}$$

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁵ Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan skala ratio dan dinyatakan dalam miliar rupiah

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$ = PDRB tahun berjalan

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

H. Sistematika Penelitian Skripsi

Adapun sistematika penelitian dalam penelitian ini terkait analisis pengaruh jumlah penduduk, penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

²⁴ BPS Indonesia, "Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)," *Badan Pusat Statistik Indonesia* 2015, no. September (2015): 90, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>.

²⁵ BPS, "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Pengeluaran 2019-2023," *Produk Domestik Regional Bruto*, 2024, 1–55.

(ZIS), serta indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan hal yang melatar belakangi suatu penelitian ini dilakukan, indentifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan adanya penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang mana membahas pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta indeks pembangunan manusia. Dilanjut dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data penelitian, serta teknis analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran hasil penelitian, dan analisis data melalui uji pemilihan

model terbaik, uji analisis model data panel, uji asumsi klasik, hingga ke uji hipotesis.

5. Bab V Pembahasan

Pembahasan ini memuat penjelasan mengenai keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang telah didapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini. Yaitu mengenai pengaruh jumlah penduduk, penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), serta indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.

6. BAB VI Penutup

Bab ini berisi uraian singkat temuan pokok atau simpulan temuan-temuan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat ditindak lanjuti.